



RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2023



Disusun oleh :

Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2023

Alamat Sekretariat Tim : Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kota, Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001

E-mail : perencanaanbapendainhil@gmail.com

(Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Bapenda Kab. Inhil)

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai penunjang pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan rencana dukungan dana APBD T.A. 2023 sebesar Rp **17.707.264.838,-** (Tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Tembilahan, September 2022
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

FADILLAH, S.Pi, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 1991103 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistimatika.	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	19
2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	29
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	30
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	17
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	24
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 ..	27
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	29
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023 dan Perkiraan Maaju Tahun 2024	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dari perencanaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Program dan Kegiatan yang ada di Renja OPD harus tercantum dalam Renstra OPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubbag/Kasubbid pada Sekretariat, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan agar diprioritaskan mendapatkan anggaran pada tahun 2023.

Kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) sebagai penjabaran dari

Rencana Strategis (Renstra) OPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagaimana lampiran I Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 050/Bappeda-REN/244 tanggal 21 April 2022 tentang Pedoman penyusunan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023, untuk rancangan awal Renja Perangkat daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2018 – 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan dibuatnya Renja-PD Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar terarah dan sesuai dengan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian dokumen Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, RKA tahun 2023 oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4. Sistematika Renja-PD

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renja-PD, serta proses penyusunan Renja-PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOPD, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja-PD.

1.4. Sistematika Renja-PD

Mengemukakan sistematika Renja-PD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Badan Pendapatan daerah tahun lalu (tahun n-2/2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun table yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1, 2.2, 2.3

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta normal dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, Tabel 2.4.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi perogram antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian perogram nasional/internasional, seperti NSKP, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

Adapun Tabel yang akan disajikan sebagaimana format tabel 2.5.

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbag ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel 2.6

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran terget kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tabel 3.1.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSKP dan SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,
- Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel Rumusan Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel yang disajikan : Tabel 4.1

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Daerah tahun 2021, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Daerah, adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PERANGKAT DAERAH dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	100		100	96	96	92	94	94
5 0 2 0 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Persen	22		22	23,8	100	22	22	100
5 2 0 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	6		2	2	100	2	4	67
5 2 0 1 2.01 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15		5	5	100	5	10	67
5 0 2 0 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100		100	100	100	92	96	96
5 0 2 0 1 2.02 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	238		90	90	100	74	164	69
5 2 0 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100		100	50	50	92	92	92
5 2 0 1 2.05 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	193		74	74	100	45	119	62

5	2	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6		3	-	-	3	3	50
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100		100	82,98	82,98	92	92	92
5	2	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	19		17	17	100	1	18	95
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	93		81	81	100	6	87	94
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	6		2	2	100	2	4	67
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	9		3	3	100	3	6	67
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	18		6	6	100	6	12	67
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	753		167	144	86	304	448	59
5	2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100		100	88,98	88,98	92	90	90
5	2	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3		1	1	100	1	2	67
5	2	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36		12	12	100	12	24	67
5	2	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3		1	1	100	1	2	67
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	185					92	92	50
5	2	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	116		38	38	100	38	76	66
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	140		45	45	100	45	90	64
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	17		13	13	100	2	15	88
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9		3	3	100	3	6	67

5	2	0	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhdap Pendapatan Daerah	Persen	10,02		9,29	8,45	90,96	9,5	9,5	95
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhdap Pendapatan Daerah	Persen	10,02		9,29	8,45	90,96	9,5	9,5	95
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	4		2	2	100,00	1	3	75
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	6		3	3	100,00	2	5	83
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	4		2	2	100,00	1	3	75
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	48		24	24	100,00	12	36	75
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	21.697		17.035	6.697	39,31	5.000	11.697	54
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	443.665		48.637	138.665	285,10	145.000	283.665	64
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	9.000		3.000	3.000	100,00	3.000	6.000	67
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah datapelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	36		12	12	100,00	12	24	67
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	98.915		2.669	27.340	1.024,35	35.400	62.740	63
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	3.183		1.451	733	50,52	1.150	1.883	59
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	595		150	150	100,00	215	365	61

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2021 sebagian besar terlaksana sesuai yang diharapkan, dengan capaian total secara umum capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program dan kegiatan yakni realisasi Fisik 91,08 % dan realisasi anggaran sebesar 73,21%. Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program dan 7 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Beberapa Sub Kegiatan kegiatan yang capaian kinerja tidak sesuai dengan target antara lain adalah sbb :

1. Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dimana dari target ASN yang akan mengikuti bimbingan teknis tidak terlaksana, hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19. Pelaksanaan Bintek hanya dilaksanakan secara zoom meeting dan tidak memerlukan adanya biaya.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari target kinerja sebesar 167 kali hanya dapat terlaksana 144 kali, hal ini disebabkan rencana konsultasi dan koordinasi ke jakarta dan Kecamatan tidak dapat dilaksanakan karena wabah pandemi covid.
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target 17.035 Objek Pajak hanya tercapai 6.697 Objek pajak, hal ini tidak terlepas dari adanya wabah covid-19 sehingga kegiatan penilaian objek pajak sangat terbatas dilaksanakan
- Penyelesaian Keberatan Pajak daerah dari target 1.451 dokumen keberatan pajak hanya dapat terealisasi sebesar 733, hal ini juga disebabkan terbatasnya gerak petugas untuk turun ke lapangan disebabkan wabah covid-19

2. Sub Kegiatan yang telah sesuai antara target dan realisasi Kinerja adalah :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Perencanaan Pengelolaan pajak Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
3. Sub Kegiatan yang melebihi dari Target yang telah ditetapkan adalah :
- Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dari target penetapan sebesar 48.637 objek pajak dapat terealisasi sebesar 138.665 objek pajak, hal ini dapat terjadi dengan memanfaatkan bantuan tenaga kolektor pajak yang berada di lapangan di setiap desa dan kecamatan.
 - Sub kegiatan Penagihan pajak Daerah dari target 2.669 Objek pajak dapat terealisasi penagihan hutang pajak terhadap 27.340 objek pajak. Hal ini disebabkan terjalannya kerjasama yang baik antara petugas Kabupaten dan petugas kolektor pajak yang berada di Desa dan Kecamatan.
4. Target Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan rencana yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan dari target 9,29 % tercapai hanya 8,25 %. Hal ini disebabkan antara lain :
- Banyaknya data wajib pajak yang mengalami perubahan yang tidak dilaporkan
 - Kurangnya sarana-dan prasarana pendukung penagihan dan pemungutan pajak Daerah
 - Masih kurangnya aparatur di bidang perpajakan
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah antara lain adalah :
- Kontribusi Pajak dari terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang optimal.
6. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :
- Memperbaiki data wajib pajak daerah secara menyeluruh

- Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan optimalisasi pendapatan dari pajak daerah
- Meningkatkan kemampuan aparatur pajak daerah melalui pelatihan di bidang perpajakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara detail dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian			atatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				((7)				(8)
I	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen			100	92	93	100	100	92	93	100	
1	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Persen			22	24	24	24	22	24	24	24	
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen			2	2	2	2	2	2	2	2	
1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			5	5	5	5	5	5	5	5	
2	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen			100	92	93	100	100	92	93	100	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan			90	74	74	74	90	74	74	74	
2.1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			-	-	18	18	-	-	18	18	
3	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen			100	92	100	100	100	92	100	100	
3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket			74	45	74	74	74	45	74	74	
3.2	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			3	2	3	3	3	2	3	3	
4	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen			100	92	93	100	100	92	93	100	
4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket			17	1	1	1	17	1	1	1	
4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			81	6	6	6	81	6	6	6	
4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket			2	2	2	2	2	2	2	2	
4.4	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket			3	3	3	3	3	3	3	3	
4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			6	6	6	6	6	6	6	6	
4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			167	304	305	305	167	304	305	305	
5	Cakupan Ketersediaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			-	100	100	100	-	100	100	100	
5.1	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit				2	2	2		2	2	2	

6	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		100	92	93	100	100	92	93	100
6.1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1
6.2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan		12	12	12	12	12	12	12	12
6.3	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1
7	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			92	93	93		92	93	93
7.1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		38	38	40	40	38	38	40	40
7.2	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		45	45	50	50	45	45	50	50
7.3	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit		13	2	2	2	13	2	2	2
7.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit		3	3	3	3	3	3	3	3
II	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		9,29	9,5	10,02	10,0	9,29	9,5	10,02	10,0
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		9,29	9,5	10,02	10,0	9,29	9,5	10,02	10,0
1.1	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen		-	1	1	1	-	1	1	1
1.2	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen		2	1	1	1	2	1	1	1
1.3	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan		3	2	1	1	3	2	1	1
1.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit		2	1	1	1	2	1	1	1
1.5	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan		24	12	12	12	24	12	12	12
1.6	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan		-	1	1	1	-	1	1	1
1.7	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak		17.035	5.000	10.000	15.000	6.697	5.000	10.000	15.000
1.8	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen		48.637	145.000	160.000	160.000	138.665	145.000	160.000	160.000
1.9	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.10	Jumlah datapelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen		12	12	12	12	12	12	12	12
1.11	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen		2.669	35.400	36.175	37.000	27.340	35.400	36.175	37.000
1.12	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen		1.451	1.150	1.300	1.350	733	1.150	1.300	1.350
1.13	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen		150	215	230	250	150	215	230	250
1.14	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan		-	2	2	2	-	2	2	2
1.15	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi tunai ke non tunai	Laporan		-	-	2	2	-	-	2	2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, sebagian besar pada Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hampir semua sasaran kinerja tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan target. Berbeda dengan Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dimana terdapat capaian kinerja yang melebihi target seperti pada Indikator Kinerja :

- Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya dari target 17.035 dapat direalisasikan sebesar 6.697, dan jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah dari target 1.451 dapat terealisasi sebesar 733 dokumen, hal ini disebabkan adanya wabah covid-19 yang membatasi gerak petugas untuk melaksanakan tugas penilaian NJOP Pajak maupun penyelesaian keberatan Pajak Daerah.
- Jumlah Dokumen Ketetapan pajak melebihi target dari target 48.637 dapat terealisasi sebesar 138.665, dan jumlah dokumen Penagihan Pajak Daerah dari target 2.669 dapat terealisasi 27.340. Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan petugas Kolektor yang berada di masing-masing Desa dan Kecamatan.

Tingkat capaian kinerja ini terkait erat dengan dukungan terhadap pencapaian visi misi Bupati Indragiri Hilir, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah mendukung pencapaian misi pertama, Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) dengan menerapkan pemerintahan daerah yang amanah dan akuntabel dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam pencapaian misi pertama, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara dinamis terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi penerimaan dan pendapatan daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Daerah dalam bidang Keuangan Daerah yaitu

Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Tugas dan fungsi badan Pendapatan Daerah berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah relatif berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dimana Daerah hanya diberi wewenang terhadap 11 jenis pajak daerah antara lain : PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, pajak Penerangan Jalan, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Minerba, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak parkir.

Hal-hal kritis yang menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah masih tingginya tunggakan Piutang Pajak Daerah dimana sampai tahun 2021. Angka tunggakan piutang pajak daerah mencapai 124 Milyar Rupiah.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil
2. Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal
3. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.
5. Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2028-2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan beberapa SKPD terkait lainnya mengemban pencapaian Misi I yaitu :

"Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum"

Dampak yang akan dirasakan terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah, yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Terkait *Sustainable Development Goals (SDGs)* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ikut mensukseskan salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, melalui program ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas dalam transaksi pajak daerah.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Pajak Daerah adalah : masih rendahnya kesadaran wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Masih banyak peluang di bidang perpajakan yang belum tergali dengan baik oleh Daerah seperti seperti Pajak PBB-P2 , dimana potensi pajaknya cukup tinggi, akan tetapi belum terdata dengan baik sehingga potensi pajak PBB-P2 belum tergali secara maksimal.

Hal-hal strategis yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan dan peluang terhadap pelayanan di bidang Pajak Daerah antara lain adalah :

- Melakukan inventarisasi data secara menyeluruh terhadap potensi Pajak Daerah terutama PBB-P2
- Melakukan sosialisasi secara berkala dan terus menerus kepada wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu
- Memberikan penghargaan (*Reward*) bagi wajib pajak yang rajin melunasi kewajiban pajaknya serara rutin dan memberikan sangksi/hukuman bagi wajib pajak yang secara terus menerus tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi, permasalahan dan hambatan tersebut tersebut antara lain :

1. Rendahnya kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya;
2. Masih banyaknya data Wajib Pajak yang tidak sesuai kepemilikan dengan yang sebenarnya, baik pada objek pajak maupun subjek pajak;
3. Realisasi target kurang maksimal dan masih besarnya tunggakan pajak daerah;
4. Potensi pajak daerah banyak belum tergali dan terdata secara maksimal;
5. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah;
6. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan ranwal renja berpedoman pada renstra perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam ranwal renja PD dengan renstra PD.

Forum PD/lintas PD merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan renja PD, dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan Bappeda. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja PD.

Hasil pembahasan rancangan renja PD dalam forum PD/lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.

Penyusunan ranwal renja juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja tahun berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam ranwal renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran renstra. Penyusunan ranwal renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi renja tahun lalu.

Hasil perumusan ranwal renja disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, hasil evaluasi renja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran PD, renja dan pendanaan PD dan penutup.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat Wajib Pajak Daerah, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tembilahan	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	93	13.227.752.088	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tembilahan	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	93	13.227.752.088	
2	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Persen	24	63.810.000	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tembilahan	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Persen	24	63.810.000	
3	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	2	43.660.000	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	2	43.660.000	
4	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	20.150.000	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	20.150.000	
5	1.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tembilahan	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	93	8.719.548.500	1.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tembilahan	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	93	8.719.548.500	
6	1.1.4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	74	8.657.198.500	1.1.4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	74	8.657.198.500	
7	1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	62.350.000	1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	62.350.000	
8	1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tembilahan	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	196.900.000	1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tembilahan	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	196.900.000	
9	1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	74	69.590.000	1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	74	69.590.000	
10	1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	127.310.000	1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	127.310.000	
11	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tembilahan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	93	1.913.493.285	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tembilahan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	93	1.913.493.285	
12	1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	28.081.000	1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	28.081.000	

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

13	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6	611.054.400	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6	611.054.400
14	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	2	165.562.500	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	2	165.562.500
15	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	3	238.138.385	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	3	238.138.385
16	1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	10.000.000	1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	10.000.000
17	1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	305	860.657.000	1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	305	860.657.000
18	1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tembilahan	Cakupan Ketersediaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	48.900.000	1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tembilahan	Cakupan Ketersediaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	48.900.000
19	1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	48.900.000	1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	48.900.000
20	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	93	1.823.980.303	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	93	1.823.980.303
21	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.400.000	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.400.000
22	1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	789.745.803	1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	789.745.803
23	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.026.834.500	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.026.834.500
24	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	93	461.120.000	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tembilahan	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	93	461.120.000
25	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	40	155.000.000	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	40	155.000.000
26	1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	88.000.000	1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	88.000.000
27	1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	138.120.000	1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	138.120.000
28	1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	80.000.000	1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	80.000.000
29	2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tembilahan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,02	4.479.512.750	2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tembilahan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,02	4.479.512.750
30	2.1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tembilahan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,02	4.479.512.750	2.1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tembilahan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,02	4.479.512.750

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

31	2.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	1	20.000.000	2.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	1	20.000.000
32	2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	1	440.144.600	2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	1	440.144.600
33	2.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	1	340.985.000	2.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	1	340.985.000
34	2.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	1	272.693.000	2.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	1	272.693.000
35	2.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	12	287.537.350	2.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	12	287.537.350
36	2.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	1	21.000.000	2.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	1	21.000.000
37	2.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	10.000	584.676.700	2.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	10.000	584.676.700
38	2.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	Dokumen	160.000	702.933.000	2.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	Dokumen	160.000	702.933.000
39	2.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	3.000	597.488.500	2.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	3.000	597.488.500
40	2.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah datapelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	12	185.141.000	2.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah datapelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	12	185.141.000
41	2.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	36.175	419.930.000	2.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	36.175	419.930.000
42	2.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	1.300	334.200.000	2.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	1.300	334.200.000
43	2.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	230	189.883.700	2.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	230	189.883.700
44	2.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	51.399.900	2.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	51.399.900
45	2.1.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi tunai ke non tunai	Laporan	2	31.500.000	2.1.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi tunai ke non tunai	Laporan		31.500.000
						17.707.264.838						17.707.264.838

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD lainnya.

Rancangan rencana kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Prangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2		NIHIL				
3						
4						
5						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pemerintah pusat (central government) untuk mengatur ke lingkungan pemerintah daerah (local government) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam memelihara kesetabilan kondisi ekonomi nasional karena transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah. Desentralisasi fiskal tersebut dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan, pemerataan, dan memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam.
2. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (*subsidiary loan*) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian anggaran baik vertikal maupun horizontal.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada visi misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah: Tujuan untuk mencapai misi pertama RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yakni "Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum", yaitu :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target 2023
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	-
1.1	Meningkatnya tata kelola Organisasi Bapenda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai evaluasi RB Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil atas komponen pengungkit	27
		Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	BB
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	10.02 %
2.1.	Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	4 %
2.2.	Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak	Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo	7 %

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang bagi Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah program yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama Badan Pendapatan Daerah. Program ini terkait langsung dengan fungsi-fungsi pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah.

Program ini juga mendukung terwujudnya ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** yaitu dengan menyediakan teknologi informasi pembayaran pajak daerah melalui sistim on line. Pembayaran pajak secara online ini dapat mengurangi penggunaan kertas, sehingga turut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah ada yang tidak sesuai dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018. Hal disebabkan adanya perubahan peraturan undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada awal penyusunan Renstra 2013 -2018 masih menggunakan Permendagri 13 tahun 2006, akan tetapi sejak tahun 2020 aturan tersebut telah diganti dengan dengan permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 mencakup 2 dua Program dan 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Program pertama adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini lebih banyak terpusat di Kantor Bapenda Indragiri Hilir Kecamatan di Kecamatan Tembilahan. Sedangkan Program kedua adalah Pengolaan Pendapatan Daerah. Program ini sasarannya tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat yang menjadi fokus sasaran adalah masyarakat wajib pajak yang memiliki objek pajak dari 11 Jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah.

Pada Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2023, Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan 2 dua Program, 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan adalah sebesar RP. 17.707.264.838, yang terdiri dari Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.227.752.088, dan program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.479.512.750,-

Pada Rancangan Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2023 Seluruh program, kegiatan dan sub. Kegiatan yang disajikan telah sesuai dengan rumusan rancangan awal RKPD Tahun 2023. Rancangan renja Tahun 2023 juga telah sesuai dengan Dokumen renstra perubahan 2018-2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tabel 4.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang berisi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif pendanaan, RKPD Tahun 2023.

Mengingat kemampuan keuangan Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbatas dalam penganggaran rencana program pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan kebijakan penganggaran program dan kegiatan prioritas agar Agar skala dan kebutuhan yang paling diinginkan terakomodir.

Rumusan rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Kabupaten Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Tembilahan	93 Persen	10 Orang	100 Persen	127.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	60.000.000
5	02	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									1.913.493.285			1.984.000.000	
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Tembilahan	93 Persen	1 Paket	100 Persen	28.081.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	35.000.000
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Tembilahan	93 Persen	14 Paket	100 Persen	611.054.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	650.000.000
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Tembilahan	93 Persen	4 Paket	100 Persen	165.562.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	170.000.000
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Tembilahan	93 Persen	3 Paket	100 Persen	238.138.385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	260.000.000
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Tembilahan	93 Persen	6 Dokumen	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	19.000.000
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Tembilahan	93 Persen	297 Laporan	100 Persen	860.657.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	850.000.000
5	02	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									48.900.000			100.000.000	
5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	2 Unit	93 Persen	48.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	100.000.000
5	02	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.823.980.303			1.859.000.000	
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	1 Laporan	93 Persen	7.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	9.000.000

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	12 Laporan	93 Persen	789.745.803	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	650.000.000
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	1 Laporan	93 Persen	1.026.834.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	1.200.000.000
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								461.120.000				525.000.000
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	40 Unit	93 Persen	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	160.000.000
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	50 Unit	93 Persen	88.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	85.000.000
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	1 Unit	93 Persen	138.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	180.000.000
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Tembilahan	93 Persen	3 Unit	93 Persen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	93 Persen	100.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								4.479.512.750				5.625.000.000
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								4.479.512.750				5.625.000.000
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10,02 Persen	1 Dokumen	10,02 Persen	20.000.000		Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10,02 Persen	80.000.000
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10,02 Persen	1 Dokumen	10,02 Persen	440.144.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10,02 Persen	450.000.000
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10,02 Persen	1 Laporan	10,02 Persen	340.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10,02 Persen	350.000.000

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	1 Unit	10.02 Persen	272.693.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	280.000.000
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	12 Laporan	10.02 Persen	287.537.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	400.000.000
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	1 Laporan	10.02 Persen	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	35.000.000
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	10000 Obyek Pajak	10.02 Persen	584.676.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	850.000.000
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	160000 Dokumen	10.02 Persen	702.933.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	820.000.000
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	3000 Layanan	10.02 Persen	597.488.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	650.000.000
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	12 Dokumen	10.02 Persen	185.141.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	190.000.000
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	36175 Dokumen	10.02 Persen	419.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	800.000.000
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	1300 Dokumen	10.02 Persen	334.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	360.000.000
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	230 Dokumen	10.02 Persen	189.883.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	240.000.000
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	2 Laporan	10.02 Persen	51.399.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	70.000.000
5	02	04	2,01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Tembilahan	10.02 Persen	2 Laporan	10.02 Persen	31.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	10.02 Persen	50.000.000
TOTAL													17.707.264.838			21.478.260.000	

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disebut Rencana Kerja (RENJA–PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibuat untuk periode 1 (satu) tahun, disusun sebagai indikator dalam menentukan arah kebijakan tahunan kinerja program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diharapkan Rencana Kerja (RENJA–PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat teratasi.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda antara lain adalah :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan time Schedul dalam pelaksanaan kegiatan/Sub Kegiatan belum tersusun secara matang sehingga capaian Realisasi Kinerja, fisik maupun keuangan seringkali lambat, dan selalu memanfaatkan waktu-waktu akhir tahun.
2. Penempatan rekening belanja yang kurang tepat, sehingga sering kali menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan karena harus menunggu adanya perubahan anggaran.

Kaedah-kaedah yang menjadi acuan dalam penyusunan renja-PD Badan Pendapatan Daerah adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah, dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Disamping itu penyusunan Renja juga memperhatikan hasil Musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, serta adanya keselarasan dengan hasil Musrenbang Tingkat Propinsi.

Tahapan selanjutnya terhadap Renja yang telah disusun adalah dilakukan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi dimaksud mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta pagu indikatif.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil agar Renja bapenda ini dapat terlaksana secara baik dan target kinerja dapat tercapai secara maksimal antara lain adalah :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja secara matang dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
2. Penyusunan Time schedul dan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Identifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan secara dini, agar dapat melakukan antisipasi lebih awal dan memperkecil resiko kegagalan mencapai target kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat khususnya wajib pajak daerah, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) yakni meningkatnya pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah yang akan berdampak pada meningkatnya anggaran pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Tembilahan, September 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

FADILLAH, S.Pi. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691103 199803 1 005